



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS PURWITO
2. Jabatan : SEKRETARIS INSTITUT
3. NHK : 640408

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.900.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **335.600.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000
3. MOBIL, MAZDA CX-5 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, WULING ALVES Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **755.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **500.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **626.153.009**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **25.000.000**

Sub Total **Rp.** **4.141.753.009**

III. HUTANG **Rp.** **----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

4.141.753.009

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.